

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DIMASA PANDEMI COVID-19
PADA KECAMATAN TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

ADEK SAPITRI

188520043



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DIMASA PANDEMI COVID-19
PADA KECAMATAN TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area*

OLEH:

ADEK SAPITRI

188520043

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Nama Mahasiswa : Adek Sapitri

NPM : 18.852.0043

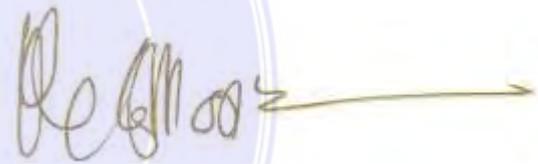
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing



Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing I



Beby Mashito Batubara, S.Sos M.AP

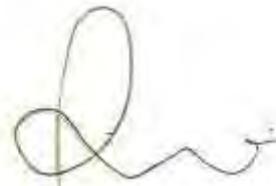
Pembimbing II

Mengetahui :



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan FISIP UMA



Khairunnisah Lubis, S.Sos. M.I.Pol

Ka.Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 3 Oktober 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya telah saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang telah saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2022



Adek Sapitri
18.852.0043

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adek Sapitri
NPM : 18.852.0043
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2022



Adek Sapitri
18.852.0043

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar dan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik maka dari itu Permasalahan yang ditemui di lapangan seperti tidak meratanya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mementingkan kepentingan pribadi dengan mengesampingkan orang-orang yang lebih membutuhkan. Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Masa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang” yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Masa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III yang menjelaskan bahwa Keberhasilan dan kegagalan dari suatu Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap Implementasi di Kecamatan Tanjung Morawa. Adapun faktor-faktor yang merupakan penghambat dalam pengimplementasian peraturan tersebut adalah dipengaruhi oleh faktor kepribadian dan faktor lingkungan.

Kata Kunci: Covid-19, Bantuan Langsung Tunai, Kebijakan Publik, Implementasi.

ABSTRACT

Poverty is an inability to buy basic necessities and cannot improve a better standard of living, therefore the problems encountered in the field such as the unequal distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency, and fraud in the implementation Direct Cash Assistance (BLT) which prioritizes personal interests to the exclusion of those who are more in need. This research is entitled "Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) Policy in the Covid-19 Pandemic Period in Tanjung Morawa District Deli Serdang Regency" which aims to determine the Implementation of the Cash Direct Assistance Program (BLT) Policy in the Covid-19 Pandemic Period in Tanjung Morawa District Deli Serdang Regency. In addition, this study aims to find out what are the factors that hinder its implementation. The theory used in this research is Edward III's theory which explains that the success and failure of a policy implementation is influenced by communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Qualitative method is the research method chosen in this study. The results of this study indicate that there is an influence of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure on implementation in Tanjung Morawa District. The factors that are obstacles in implementing these regulations are influenced by personality factors and environmental factors.

Keywords: *Covid-19, Direct Cash Assistance, Public Policy, Implementation.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Adek Sapitri lahir di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Pada Tanggal 21 Mei 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan putri dari ayahanda Sadikin dan Ibunda Ahirulningsih. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) SDN 101980 INP. 95/96 Bangun Rejo dan selesai pada tahun 2012 kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Swasta Nur Azizi Tanjung Morawa, aktif dalam Organisasi Palang Merah Remaja (PMR) dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Morawa masih aktif dalam kegiatan organisasi Palang Merah Remaja (PMR) dan selesai pada tahun 2018. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Medan Area (UMA) dengan mengambil Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat berhasil diselesaikan. Adapun tema yang dipilih dalam skripsi ini adalah tentang pemerintahan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, yaitu Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Orang tua penulis yang tercinta, yaitu Ayahanda Sadikin dan Ibunda Ahirulningsih yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Mereka juga adalah dua orang terbaik yang sudah membesarkan penulis tanpa rasa pamrih.
2. Abang penulis yang tersayang, yaitu Soninda yang bersedia menjadi teman bercanda tawa sehingga membuat kehidupan penulis menjadi lebih berwarna.

3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak M Immanuddin Kandias Saraan, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris dari penulis yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2018 yang Sudah Memberi Dukungan
9. Pegawai di Kantor Kecamatan Tanjung Morawa dan masyarakat yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang bersifat mendidik demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Atas perhatiannya, penulis sampaikan rasa terima kasih.

Medan, Oktober 2022

Adek Sapitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Secara Teoritis	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Kebijakan Publik	9
2.1.2. Implementasi Kebijakan	11
2.1.3 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	15
2.1.4 Kemiskinan	18
2.1.5 Pandemi Covid-19	20
2.2 Penelitian Relevan.....	22

2.3 Kerangka Berfikir	25
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	28
3.2.2 Waktu Penelitian.....	29
3.3 Informan Penelitian	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4.1 Observasi	31
3.4.2 Wawancara	32
3.4.3 Dokumentasi	33
3.4.4 Gabungan/Triangulasi data	33
3.5 Metode Analisis Data	34
BAB IV.....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
4.1.1 Kantor Kecamatan Tanjung Morawa.....	41
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Tanjung Morawa	43
4.1.3 Struktur Organisasi	44
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.....	47
4.2.2 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Masa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.....	67
BAB V.....	73
KESIMPULAN DAN SARAN	73

5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80



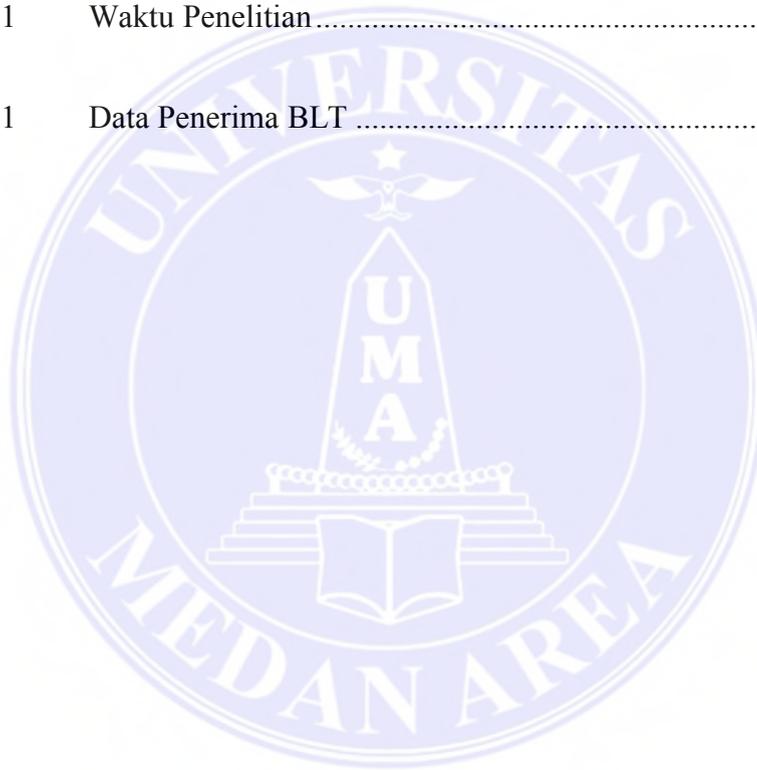
DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Kerangka Pemikiran.....	26
Bagan 4. 1	Struktur Organisasi.....	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data penduduk terpapar Covid-19	3
Tabel 1.2	Data Pengajuan BLT	4
Tabel 2.1	Penelitian Relevan.....	22
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	26
Tabel 4.1	Data Penerima BLT	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Hal ini juga dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang RI tentang Kemiskinan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Lebih lanjut kompleksitas kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja tetapi juga berkaitan dengan metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan ini. Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan pada angka kemiskinan pada periode Maret-September 2021 hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang berkelanjutan, hal ini sangat berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk, sehingga mempengaruhi angka kemiskinan tetapi pada September 2021 mulai menunjukkan perbaikan. Tidak terlepas dari Kabupaten Deli Serdang pada Kecamatan Tanjung Morawa, angka kemiskinan juga sangat naik.

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang selama ini didominasi oleh pedagang dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sangat bertumpu pada sektor kerajinan tangan, dan kuliner tradisional. Namun, Sejak adanya pandemi Covid-19 kegiatan ekonomi menjadi lumpuh total. Hampir semua kegiatan dibatasi dan ditutup untuk mencegah penularan Covid-19. Dengan adanya kasus seperti ini, menyebabkan warga Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang mengalami kesulitan dan angka pengangguran terus bertambah, yang tentunya diikuti dengan bertambahnya masyarakat miskin. Perekonomian masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Daya beli masyarakat berada pada titik terendah karena mereka tidak memiliki penghasilan atau penghasilan mereka menjadi berkurang. Adanya permasalahan tersebut menjadi dasar dibentuknya suatu kebijakan pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai.

Bantuan Langsung Tunai atau yang disingkat dengan BLT merupakan salah satu Program pemerintah sebagai upaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, yakni dengan cara memberikan bantuan uang secara tunai. Salah satu sumber dana yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 adalah dengan menggunakan Dana Desa (DD). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) ini sudah disalurkan kepada masyarakat sejak bulan April 2020 sampai Desember 2021 dengan jumlah uang Perbulan sebanyak Rp. 300.000 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Berikut adalah Data Penduduk Kurang Mampu atau miskin di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yaitu sebanyak 6.523 kepala keluarga dan keluarga penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 2.863 per KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Adapun data penduduk terpapar covid-19. Berikut ini adalah daftar jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang terpapar Covid-19:

TABEL 1.1

DATA PENDUDUK TERPAPAR COVID-19 DI KECAMATAN TANJUNG MORAWA

NO	TAHUN	Positif	Sembuh	Meninggal
1	2020	1.080	927	153
2	2021	295	273	22
3	TOTAL	1.375	1.200	175

(Sumber: Data Penduduk Kecamatan Tanjung Morawa)

Berdasarkan data penduduk terpapar covid-19 di Kecamatan Tanjung Morawa pada tahun 2020 terdapat 1.375 penduduk yang terpapar covid-19, diantaranya 1.080 orang positif covid-19, 927 orang dinyatakan sembuh, dan 153 orang meninggal dunia. Dan pada tahun 2021 terdapat 1.200 penduduk yang terpapar Covid-19 diantaranya 295 orang positif Covid-19, 273 orang dinyatakan sembuh dan 22 orang meninggal dunia.

Berikut ini adalah data penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) yang di usulkan oleh desa kepada PMD (Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2020-2021:

TABEL 1.2
Data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2020-2021

No	Desa	Tahun 2020-2021			
		Target	Realitas	Target	Realitas
1.	Aek Pancur	100	42	100	42
2	Bandar Labuhan	500	200	210	108
3	Bangun Rejo	300	114	178	139
4	Bangun Sari	250	100	250	139
5	Bangun Sari baru	150	50	150	108
6	Buntu Bedimbar	425	132	158	95
7	Dagang Kelambir	100	47	155	109
8	Dagang Krawang	130	50	130	106
9	Dalu X A	470	150	190	130
10	Dalu X B	400	130	125	69
11	Lengau Seprang	150	35	136	50
12	Limau Manis	450	210	195	154
13	Medan Sinembah	146	58	158	111
14	Naga Timbul	90	45	145	100
15	Penara Kebun	40	25	178	90
16	Perdamean	142	35	14a2	101
17	Punden Rejo	100	35	165	120
18	Sei/Sungai Merah	30	10	200	108
19	Tanjung Baru	89	39	199	137
20	Tanjung Morawa A	500	210	215	107
21	Tanjung Morawa B	452	195	247	150
22	Tanjung Mulia	100	45	165	102
23	Telaga Sari	80	30	155	111
24	Ujung serdang	114	45	200	135
25	Wonosari	215	75	190	50

(sumber: Data penduduk kecamatan tanjung morawa)

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa data penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tidak terealisasi dengan baik dikarenakan jumlah data yang sesuai dengan di lapangan tidak sesuai dengan permintaan dari desa dapat dikatakan tidak memenuhi target yang sudah terlihat di lapangan sehingga banyak masalah yang sekali timbul apalagi dimasa pandemi seperti ini sangat banyak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Program Bantuan Langsung Tunai berasal dari dana desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi di sisi lain sering terjadi pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak serentak di beberapa desa, sehingga menyebabkan timbulnya asumsi masyarakat tentang tidak amanahnya pihak desa dalam menyalurkan bantuan. Selain itu, para pegawai yang mengawasi penyaluran dana untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni Bidang PMD (Pemberdayaan Masyarakat) di Kantor Camat Tanjung Morawa hanya berfokus kepada data usulan warga yang berhak menerima bantuan dari pihak desa tanpa memprospek terlebih dahulu memang pantas atau tidak warga tersebut menerima bantuan menjadi pemicu kecemburuan di antara masyarakat.

Namun pada kenyataannya, prosedur pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tidak seperti apa yang diharapkan masyarakat. Adapun permasalahan yang ditemui di lapangan seperti tidak meratanya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) antar kepala keluarga di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mementingkan kepentingan pribadi dengan mengesampingkan orang-orang yang lebih membutuhkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya kecemburuan di masyarakat terutama bagi yang menerima dengan nominal dengan jumlah yang lebih sedikit. Mereka iri dengan teman-temannya atau dengan tetangganya yang justru menerima bantuan dengan nominal yang lebih besar. Mereka juga tidak mengerti kriteria apa yang digunakan oleh aparat desa untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan dengan jumlah yang lebih besar tersebut. Tetapi mereka tetap saja bersyukur bisa memperoleh bantuan dari pemerintah yang tentunya dapat membantu kehidupan mereka di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang di atas yang memuat tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik, Manajemen Sumber daya Manusia dan Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

1.4.2 Secara Praktis

- a. Bagi Penulis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkannya pada fakta di lapangan.
- b. Bagi Civitas Akademika yaitu Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, mengenai Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam buku *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, yang ditulis oleh *Riant Nugroho D.* (2006) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do.*”, yaitu segala hal atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.

Amirullah dalam *Muhammadi* (2001:371-372) menyatakan bahwa Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang di inginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh tepat sasaran. Sementara itu, *Thomas Dye* (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersamamharus menjadi pertimbangan yang *holistic* agar

Kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu Kebijakan karna ini juga sebagai contoh masa yang akan datang. Adapun criteria penentuan Kebijakan publik Menurut Said Zainal Abidin (2004: 56-59) tidak semua Kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses, hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian criteria.

Berikut kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan Kebijakan:

- a. Efektivitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternative Kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang di inginkan.
- b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
- c. Cukup, suatu Kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- d. Adil
- e. Terjawab, Kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan dari pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka menanggapi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh masyarakat.

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Menurut Syauckani (2006:295) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan Kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil. Sebagaimana hasil yang diharapkan dalam perencanaan Rangkaian tersebut mencakup.

- a. persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari Kebijakan yang sudah ditentukan.
- b. menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan Kebijakan tersebut.
- c. bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara jelas kepada masyarakat.

Adapun menurut (Usman, 2005 :70) mengemukakan pendapatnya tentang implementasi Bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas saja melainkan sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Implementasi Kebijakan menurut Nugroho (2014:657) dijelaskan bahwa, “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Konsep dasar implementasi kebijakan publik ini mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah keputusan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara menyeluruh.

Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, antara lain yaitu:

- a. Adanya program atau Kebijakan yang akan dilaksanakan
- b. Adanya target kelompok yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan suatu Kebijakan dan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan yang akan terjadi pada saat mengimplementasikan suatu Kebijakan tersebut.
- c. Unsure pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

a. Teori Implementasi Kebijakan Publik George C Edwards III

George Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut George Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan (Indra Muda 2017:127) yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*).

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi memiliki tujuan agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan bertujuan agar informasi menjadi jelas dan dapat mudahdipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan disebut Disposisi. Disposisi berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Adapun karakter penting yang harus ada dalam diri pelaksana kebijakan yaitu kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam suatu program yang telah dijalankan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*).

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terbagi-bagiakan cenderung melemahkan pengawasan sehingga membuat prosedur birokrasi menjadi rumit yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak *fleksibel*.

2.1.3 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai Kebijakan lain yang telah diterbitkan diantaranya adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) yang dirancang kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. BLT merupakan implementasi dari Intruksi Presiden No 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai. program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi).

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan uang kepada keluarga miskin yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemic Covid-19. Adapun nilai BLT adalah Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi criteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya, Bantuan Langsung Tunai ini bebas pajak. Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Adapun Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Program BLT agar dapat menjadi bantuan yang efektif dan efisien, maka diperlukan beberapa langkah, antara lain yaitu:

- a) Manajemen penyaluran dana yang baik dan sistematis mengikuti prosedur yang sudah dibuat, agar tercapainya tujuan dari program BLT yang sebenarnya yaitu mensejahterakan masyarakat kecil.
- b) Diperlukan pengawasan terhadap penyaluran dana BLT, karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan program BLT tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Bantuan dana langsung tidak diberikan secara langsung dan Cuma-Cuma dikhawatirkan karena masyarakat akan beranggapan ini uang Cuma-Cuma masyarakat pasti akan bergantung pada BLT. Maka dana ini direalisasikan dalam bentuk bantuan dana usaha sehingga dari dana tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat tidak mampu. Masyarakat juga tidak menjadi malas karena hanya menggantungkan diri pada bantuan selain itu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Adapun syarat warga miskin yang dapat menerima program Bantuan Langsung Tunai antara lain yaitu: Luas lantai bangunan tempat tinggal Kurang dari 8 (delapan) m/orang, Jenis lantai bangunan tempat tinggal Tanah/bamboo/kayu murahan/ semen kualitas jelek, Jenis dinding tempat tinggal Bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plaster,

Fasilitas tempat buang air besar Tidak punya/bersama, Sumber penerangan utama Bukan listrik.

2.1.4 Kemiskinan

Menurut Niemietz (2011) dalam Maipita (2014) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan dan obat-obatan, sedangkan badan Pusat Statistik (2016) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimanan seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Adapun penyebab kemiskinan diantaranya adalah (Maipita, 2014:60)

Menurut Spicker penyebab kemiskinan dibagi menjadi dalam 4 mazhab, yaitu:

1. *Individual explanation*

Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud misalnya malas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Mereka juga sering salah dalam memilih, termasuk dalam memilih sekolah, memilih pekerjaan, jalan hidup, tempat tinggal, dan lainnya.

2. *Familiar explanation*

Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan cenderung disebabkan oleh faktor keturunan. Dalam hal ini misalnya tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa ke dalam kemiskinan kaena kurangnya skill yang dimiliki untuk bekerja ditempat yang layak. Akibatnya, sang orang tua juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya sehingga pada akhirnya si anak juga jatuh kepada kemiskinan.

3. *Subcultural explanation*

Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat-istiadat, atau akibat karakteristik perilaku 13 lingkungan. Misalnya, kebiasaan yang bekerja adalah kaum perempuan, kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya, keyakinan bahwa mengabdikan kepada para raja atau orang terhormat meski tidak diberi bayaran dan lainnya yang berakibat pada kemiskinan. Terkadang orang seperti ini justru tidak merasa miskin karena sudah terbiasa dan memang kulturnya yang sudah demikian.

4. *Structural explanation*

Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan timbul akibat dari ketidakseimbangan, perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas.

2.1.5 Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan oleh sebuah fakta mengenai munculnya penyakit sangat menular yang menyerang organ pernapasan dan mematikan di daratan Tiongkok. Kasus penyakit menular yang terjadi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei ini dengan cepat menyebar ke seluruh Tiongkok dan seluruh dunia (WHO, 2020). Sumber penularan diduga berasal dari hewan kelelawar tetapi ini masih belum diketahui dengan pasti, akan tetapi kasus pertama kali dilaporkan berkaitan dengan aktivitas pasar ikan di Wuhan yang juga menjual hewan kelelawar (Beck & Tobin, 2020; Nishiura et al., 2020).

Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan secara resmi pada 11 Februari 2020 bahwa penyakit menular ini adalah *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Pada manusia, jenis coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti halnya penyakit SARS, MERS yang bersifat mematikan, seperti halnya juga COVID-19. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia, dan telah menyebar luas di Tiongkok serta lebih dari 190 negara dan teritori lainnya (Susilo et al., 2020). Cepatnya penyebaran ini dikarenakan bertepatan dengan waktu libur akhir tahun, perayaan Natal 2019, Tahun Baru 2020, dan menyambut perayaan Imlek, sehingga pergerakan manusia begitu padat antar daerah, maupun antar negara (Putsanra, 2020). Sejak Januari 2020 kasus infeksi COVID-19 di dunia terus meningkat, pada Maret 2020 lebih dari 190 negara telah mengonfirmasi terjangkit virus ini, dengan

jumlah 781.485 kasus (Bramasta, 2020). Pada bulan April jumlah kasus mencapai 3.208.977 kasus (Aida, 2020).

Sedangkan pada bulan Mei jumlah kasus mencapai 6.176.242 kasus (G. S. Putri, 2020). Beberapa negara di dunia selain Tiongkok yang mengalami jumlah kasus infeksi terbanyak antara lain Korea Selatan, Jepang, Italia, Spanyol, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Di Indonesia kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah dua kasus. Pada akhir bulan Maret tercatat terdapat 1.528 kasus terkonfirmasi positif terinfeksi (Nugraheny, 2020). Pada bulan April tercatat terdapat 10.118 kasus (Nugraheny, 2020). Sedangkan pada bulan Mei lonjakan kasus masih terus terjadi, yakni mencapai 26.473 kasus (Hakim, 2020) dan seluruh propinsi di wilayah Indonesia telah melaporkan adanya kasus di setiap daerah. Dalam situasi saat ini, COVID-19 bukanlah wabah yang dapat diabaikan. Di Indonesia penyebaran virus ini telah melalui transmisi lokal secara signifikan atau penularan telah terjadi di dalam daerah tertentu.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus serta kasus infeksi di Indonesia, pemerintah telah mengambil salah satu kebijakan yakni pembatasan aktivitas di ruang publik secara langsung. Seperti pembatasan aktivitas di luar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), serta kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah. Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi dari kekarantinaan kesehatan.

2.2 Penelitian Relevan

Hasil penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian relevan ini menjadi titik tolak untuk peneliti dalam melakukan penelitian, adapun jurnal yang relevan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Relevan

No	Nama/Sumber	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	<i>Made&Nyoman</i> (Jurnal, 2021)	Implementasi Kebijakan BLT- Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu dimana target group merupakan tujuan utama Kebijakan, diperlukan strategi manajemen untuk merubah perilaku target group, kemampuan dalam pengawasan supaya tidak mis management, serta moral para pelaksana Kebijakan yang berkomitmen dan menjunjung tinggi kejujuran serta	perbedaan terdapat pada masalah yang diteliti. Jika penelitian tersebut berfokus pada Camat di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Sedangkan penelitian ini meneliti Tentang BLT di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten

			menghindari konflik internal.	Deli Serdang.
2.	Choiriyah (Jurnal, 2018)	Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian nya yaitu, masalah kemiskinan baik di Indonesia khususnya kota Palembang masih terus menuntut pemerintah untuk menemukan program yang benar dan tepat dalam menangani masalah kemiskinan tersebut, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin akibat dampak kenaikan BBM di seluruh penjuru Indonesia. Tanpa disadari, dampak permasalahan ini akan sangat berpengaruh dalam berbagai bidang	terdapat pada masalah yang diteliti. Jika penelitian tersebut berfokus pada Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II, Sedangkan penelitian ini meneliti Tentang BLT di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. penelitian ini tidak meneliti pada saat masa pandemic covid-19,

			<p>kehidupan. Berdasarkan Intruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 14 Mei Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rumah Tangga Tepat Sasaran (RTS) dalam rangka Kompensasi Pengurngan Subsidi BBM.</p>	
3.	Amrida Ningci Siregar (Skripsi, 2021)	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid- 19 Di Desa Tanjung Seri Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2020.	<p>Penelitian ini menggunkan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian nya yaitu, terdapat beberapa hambatan kecil dalam proses pedistribusiannya kurang berjalan dengan baik sesuai dengan harapan oleh masyarakat walaupun dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan umum</p>	<p>Terdapat pada masalah yang diteliti. Jika penelitian tersebut berfokus pada Di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2021., Sedangkan</p>

			<p>disamping itu implementasi Bantuan Langsung Tunai dana Desa pada masyarakat Desa Tanjung Seri cukup efektif karena memang diberikan kepada masyarakat yang memenuhi criteria sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.</p>	<p>penelitian ini meneliti Tentang BLT di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.</p>
--	--	--	--	--

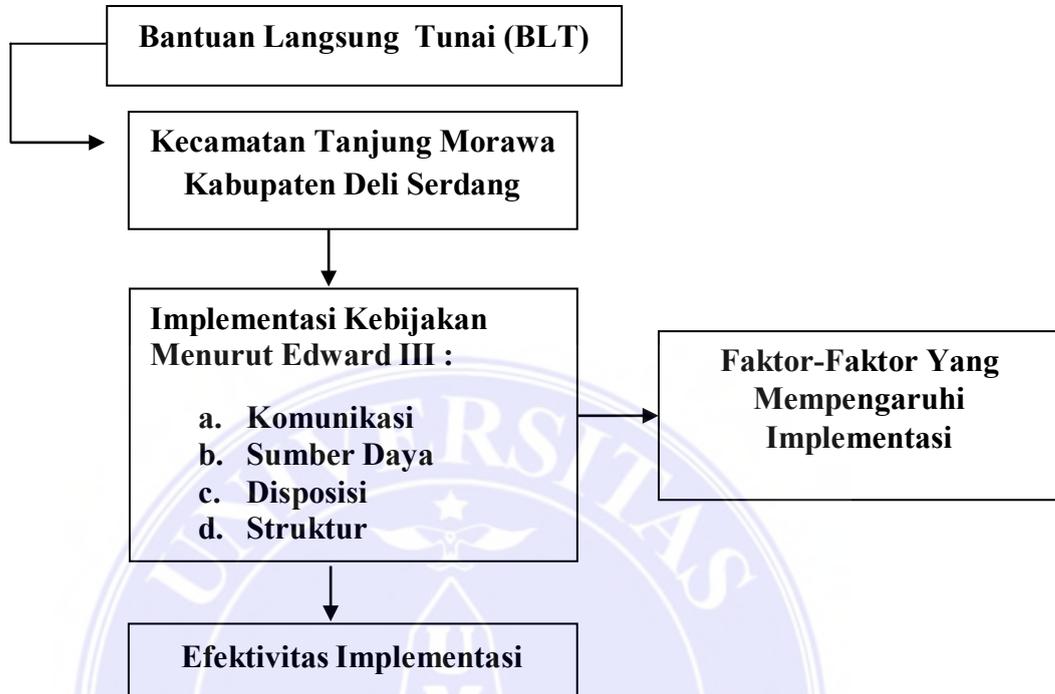
2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Plano (2010:266) kerangka berpikir merupakan inti dari sebuah kegiatan penelitian yang berisi tentang dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu pemerintahan dan ilmu politik), teori yang digunakan kerangka berpikir mengacu pada kaitan yang logis mengenai perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel dengan maksud untuk menjelaskan kedua hal tersebut.

Adapun kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut: Bantuan Langsung Tunai pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Bagan 2.1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan langkah-langkah ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada dilokasi penelitian sekaligus mengumpulkan data dan indikasi yang dipandang akan menjawab permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, dalam metode penelitian terdapat beberapa hal yang pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan berbagai aktivitas pengumpulan data dengan cara ilmiah, artinya mengacu kepada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional empiris, dan sistematis
- b. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang mempunyai criteria tertentu, yaitu valid menunjukkan derajat ketepatan antara data kesungguhan terjadi pada objek dengan data dapat dikumpulkan oleh peneliti.
- c. Penelitian juga harus mampu menggunakan sumber data tepat dan cukup jumlahnya, serta menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang benar, selanjutnya agar mendapatkan data yang objektif perlu digunakan sampel yang besar atau sumber data yang jumlahnya mendekati jumlah populasi.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut *McMillan dan Schumacher* (1997) metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung kepada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilah. Metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat didalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, lengkap, rinci dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (sukidin,2002).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif adalah untuk mendapatkan data secara deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menghasilkan data dengan cara mencari informasi, menyelidiki, melihat kondisi, keadaan apa yang dapat dilihat sehingga menghasilkan suatu data tidak terlepas dengan adanya narasumber yaitu orang-orang sekitar atau masyarakat yang memahami keadaan. Untuk dijadikan laporan penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif maka peneliti dapat melihat fenomena apa yang terjadi secara cermat dan mendeskripsikan dengan kata-kata bahasa secara ilmiah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	Des 2021	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agu 2022	Sep 2022	Okt 2022
1	Pengajuan Judul											
2	Bimbingan Proposal											
3	Seminar Proposal											
4.	Revisi Proposal											
4	Data/ Penelitian											
5	Seminar Hasil											
6	Perbaikan Skripsi											
7	Sidang											

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Dalam melakukan penelitian sangat dibutuhkan seorang informan karena untuk memperoleh informasi sesuai dengan obyek yang ditentukan dan menguasai sesuai

dengan permasalahan. Karena seorang memiliki informasi data mampu bersedia dalam memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus mampu terjun kelapangan untuk melihat situasi dan menemui seorang informan dengan itu seorang peneliti percaya dan narasumber tersebut juga menguasai permasalahan dan kejadian apa yang terjadi. Dapat ditentukan pengambilan teknik informan adalah harus dengan pertimbangan agar tidak terjadinya mendapatkan data yang *hoax*. Dalam hal ini peneliti memilih informan dan menetapkan kepercayaan.

Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Informan Kunci adalah seseorang yang tahu dan paham secara keseluruhan tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci memahami kejadian atau fenomena dilapangan secara garis besarmyadan memahami informasi tentanginforman utama. Dalam penelitian ini informan kunci nya adalah Bapak Camat dengan nama Marianto Irawadi, S.Sos dan Bapak H. Ibnu Hajar S. Sos selaku Sekertaris Camat.
- b. Informan Utama adalah seseorang yang mengetahui secara teknis dan detail tentag permasalahan yang akan diteliti dan dipelajari. Yang menjadi Informan Utama dalam penelitian ini yaitu Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat) dengan nama Ibu NurhidayaS.E.
- c. Informan Tambahan/pendukung merupakan seseorang yang mampu memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam sebuah penelitian kualitatif. Yang menjadi Informan tambahan atau pendukung disini adalah Masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa sebagai Keluarga penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

(BLT), antara lain: Ibu Rubina, Ibu Sugiani, Bapak persadan ginting, Ibu Nursiyem, dan Bapak Sadiyo.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu Menurut Ibrahim (2018:80) mengutip pendapatnya Sugiyono menyatakan bahwa ada empat teknik dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yakni: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Gabungan/Triangulasi.

3.4.1 Observasi

Dalam penelitian Kualitatif Observasi menurut (Sangadji dan Sopiah, 10:192) merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, mendengarkan, mencium, mengecap dan meraba termasuk bentuk observasi. Instrument yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan peneliti juga ikut berpartisipasi dalam observasi guna melihat dan mengamati permasalahan yang sedang terjadi. Dan dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Maka dari itu peneliti mendengarkan apa yang di ucapkan dan berpartisipasi, benar-benar berada dalam keseharian pelaku yang di teliti atau informan dan keberadaan peneliti dapat terlibat secara aktif maupun tidak aktif.

3.4.2 Wawancara

Menurut (Yunus, 2010: 358) wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni: 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan. Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Jadi wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus.

Peneliti mewawancarai dengan bertatap muka secara langsung (face to face) dengan informan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan dengan membawa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan, maka dari itu peneliti dapat menggunakan alat bantu seperti handphone untuk merekam suara atau tape recorder, kemudian material lain seperti buku atau pulpen untuk mencatat hal penting agar wawancara menjadi lancar. Adapun yang menjadi sumber informasi yang diwawancarai peneliti yaitu Bapak Marianto Irawadi, S.Sos, Bapak H. Ibnu Hajar S.Sos kemudian Ibu Nurhidayah S.E, dan

Masyarakat lainnya menjadi narasumber wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (yusuf, 2014). dari adanya dokumen tersebut akan di telaah oleh peneliti sebagai salah satu bukti fakta yang ada dilapangan sehingga memberikan informasi yang akurat, dokumen dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, catatan serta dokumen lain yang terikat dalam penelitian.

3.4.4 Gabungan/Triangulasi data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi pasrtisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang serempak.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisa data di artikan sebagai upaya atau cara mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga karakteristik, sifat-sifat data tersebut mudah di pahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkapasitan dengan penelitian tersebut berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan adapun alurnya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Maka dari itu, dalam reduksi data peneliti akan memilah dan menyederhanakan informasi yang didapatkan dilapangan berlangsungnya secara terus menerus selama penelitian berlangsung sehingga mendapatkan kesimpulan-kesimpulan pada akhirnya dan dapat di tarik dan diverifikasi data yang sesungguhnya.

2. Penyajian atau Display Data

Dalam penyajian data, Miles & Huberman mengartikan dengan membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan penyajian yang baik sebagai suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid dimana bentuk penyajiannya meliputi:

berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Pada langkah ini peneliti berusaha untuk menyusun data yang relevan sehingga informasi yang ada dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah yang diteliti dengan maksimal.

3. Menarik Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada data yang didapat harus melakukan verifikasi-verifikasi didalamnya sehingga penarikan kesimpulan akan menghasilkan sebuah kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti akan menyeleksi data yang ada, memilah satu persatu data yang diperoleh dan disusun dalam kesatuan kerangka berfikir dengan menggunakan konsep kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik sebagai pisau analisis.

Dengan kata lain, peneliti memilih reduksi data untuk melihat seberapa besar dampak dari Kebijakan Bantuan Sosial di masyarakat serta apakah pelaksanaan kebijakan sudah optimal, setelah itu sebagian data penelitian peneliti tabulasika dalam bentuk tabel sehingga dalam membuat kesimpulan peneliti meletakkan data yang valid dalam memperkuat argumen. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dan penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data menjadi dasar pada penelitian ini.

3.6 Definisi Konsep dan Operasional

Konsep dan operasional memiliki kaitan dengan suatu implementasi sebuah Kebijakan. Konsep dalam hal ini diartikan sebagai suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.

Sedangkan Pengertian operasional adalah sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2015).

Jadi, dapat disimpulkan hubungan antara implementasi Kebijakan dengan konsep yang dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki suatu fenomena yang dapat menyimpulkan penalaran sehingga kelompok lain akan mengikuti hal yang sama dengan fenomena tersebut. jika sudah memiliki konsep maka operasional memiliki sifat untuk menilai suatu kegiatan yang bervariasi untuk ditetapkan pada kegiatan ini memiliki kesimpulan yang sudah dipelajari. Tidak terlepas pada implementasi Kebijakan didalamnya ada yang menjalankan yaitu implementor sudah baik belum menjalankan kegiatan tersebut.

a. Definisi Konsep

Konsep dalam hal ini diartikan sebagai suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.

1. Kebijakan Publik, Menurut *Thomas Dye* (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang *holistic* agar Kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu Kebijakan karna ini juga sebagai contoh masa yang akan datang.
2. Implementasi Kebijakan, Menurut *Nugroho* (2016) implementasi kebijakan adalah suatu cara agar sebuah Kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik demi tercapainya tujuan
3. Bantuan Langsung Tunai, merupakan implementasi dari intruksi presiden No 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu, besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin disebabkan kenaikan harga (inflasi).

b. Definisi Operasional

Operasional adalah sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (*Sugiono, 2015*).

Adapun indikator Implementasi Kebijakan menurut *Edward III* berikut uraian nya:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Berikut adanya tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi. Edward III Mengemukakan tiga variable tersebut diantaranya:

- a. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, Komukasi yang dilakukan implementor harus jelas sehingga pelaksana tidak bingung untuk menjalankan suatu perintah.
- c. Konsistensi, pada saat mengeluarkan aturan yang akan diterapkan maka harus konsisten jelas dan tepat sehingga dengan ini mempercepat pengimplementasian, jika perintah yang diberikan selalu berubah-ubah maka menimbulkan masalah bagi pelaksana.

2. Sumber Daya

Variabel atau faktor ketiga adalah Sumber daya. Edward III dalam Agustino (2012:151) Mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas

pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan disebut Disposisi. Disposisi berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Adapun karakter penting yang harus ada dalam diri pelaksana kebijakan yaitu kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam suatu program yang telah dijalankan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (Leo Agustino, 2016 : 141) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah Membuat standar operating procedures (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatankegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

1. Dilihat dari teori George Edward III (dalam Subarsono, 2005-90) dimana teori ini menjelaskan implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi Kebijakan. Menurut George Edward III terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi Kebijakan, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Komunikasi, berdasarkan penjelasan diatas mengenai indikator komunikasi penulis menganalisis bahwa penyaluran (*Transmisi*) komunikasi kejelasan komunikasi dan konsistensi yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kantor Camat Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dalam pengimplementasikan Kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah efektif dan berjalan dengan baik hal ini juga sudah dibuktikan dengan adanya kunjungan dalam pengawasan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) walaupun dimasa pandemic pegawai juga harus

mematuhi protocol kesehatan dan menjaga jarak. Proses penyampain informasi sudah dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada kepala desa untuk di sosialisasikan kepada masyarakat agar paham dengan prosedur untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimasa Pandemi Covid-19.

- b) sumber daya, berdasarkan penjelasan di atas mengenai sumberdaya maka dapat disimpulkan bahwa dimensi baik itu, staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Sudah efektif dan bekerja sesuai dengan bidangnya didalam sumber daya sangat diperlukan karena kelengkapan salah satu sumber daya adalah implementornya sesuai dengan wewenang dan di dukung oleh fasilitas yang berpengaruh, bagaimana jika suatu implementasi dijalankan tetapi implementornya masih tidak mencukupi maka implementasi Kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimasa Pandemic Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan dengan baik .
- c) disposisi. Sikap pelaksana atau implementor dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kurang komitmen terhadap peraturan namun dengan berjalannya waktu pelaksa pembagian Bantuan Langsug Tunai (BLT) sudah membaik karena adanya perbaikan struktur birokrasi.
- d) struktur birokrasi, adanya pemonitoring dan pengawasan yang lebih ketat untuk melihat pelaksanaan pembagian Bantuan

Langsun Tunai (BLT) sesuai dengan *Standart Operation Procedur* (SOP).

1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Masa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor Kepribadian, sikap dan perilaku implementor pada Kantor Camat Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sudah efektif dan efisien, yang tidak efektif adalah implementor pelaksana pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat adanya kecurangan pada pihak desa yang mengesampingkan orang yang membutuhkan dan mendahulukan kerabat dekat, tidak adanya sanksi berat kecuali pelaporan terhadap inspektorat terkait pelanggaran yang dilakukan pelaksana dalam pembagaian Bantuan Langsung Tunai. Hal ini yang dapat menghambat keberlangsungan dari proses Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsug Tunai (BLT) dimasa Pandemi Covid-19 pada kecamatan Tanjung morawa Kabupaten Deli Serdang.
- b) Faktor Lingkungan, faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap dari perilaku implementor karena ini disebabkan adanya pemaksaan dari pihak masyarakat untuk selalu mendapatkan program Bantuan langsung Tunai (BLT) sehingga para implementor kurang efektif dan efisien untuk menanggapi masyarakat dan dapat menghambat suatu proses Implementasi

Kebijakan program bantuan langsung Tunai (BLT) dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Masa Pandemi Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, antara lain:

- a) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut adalah Ikut serta dan patuh dalam mengimplementasikan Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Masa Pandemi Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, harus mampu bekerja dengan hati, ikhlas, jujur, dan inovatif agar lebih produktif dapat diandalkan sebagai abdi masyarakat dengan pandai memilih lingkup pergaulan.
- b) Pimpinan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang diharapkan lebih memiliki kegagasan dan konsistensi dalam menegakkan disiplin dan dapat melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kedisiplinan rendah.
- c) PMD kecamatan Tanjung Morawa lebih memberikan sanksi bagi pelaksana penyaluran dana desa untuk BLT apabila tidak tepat sasaran.
- d) Dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anggara, Yahya.(2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Cv pustaka Setia.

Anggara, Sahya. (2014). "*Kebijakan Publik*". Jawa Barat. Pustaka Setia.

Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

D, Nugroho, Riant. (2006) *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta:PT Gramedia.

Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Indra Muda, (2019). *Teori Administrasi Publik*. Medan: Medan Area University Press

Irawan, (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kusumanegara, Salahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Medika.

Makmur, H dan Thahier, Rohana, (2016). *Konseptual dan konseptual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama

Moleong, L.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy (2006). *Meteologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rosfadhila, Meuthia. Toyamah, Nina. Dkk. (2003). *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerimaan Program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta: SEMERU.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Suharto, Edy, (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suharsono. (2010) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta.

Widianto, Bambang. (2018). *Program Bantuan Pemerintah untuk Individu Keluarga, Dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Jakarta. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Tachjan. 2006. *Implentasi Kebijakan Publik*. (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik indonesia (AIPi)).

Undang-Undang:

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Undang-Undang RI tentang Kemiskinan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

Jurnal:

Akib, Irwan. Rifaisal. "Bantuan Langsung Tunai" Jurnal Equilibrium. Vol. 3. No.2. 2016

Arya.Made, Sukraaliawa. Nyoman "Implementasi Kebijakan BLT-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Ambengan Kecamatan Kabupaten Buleleng" Locus Majalah Ilmiah Fisip.Vol 13. No 2. 2021

Burhanuddin. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa"

Choiriyah "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II" Islamic Banking.Vol 3. No 2. 2018.

Ninci Siregar. Amrida “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2020”, (Skripsi) 2021.

Nurgiansyah, Heru. “Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan”. Universitas Pendidikan Indonesia. 2018

Iqbal. Hasbi, “Implementasi Kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus, (Tesis), 2008.

Herdiana. Dian. Wahidah, Diah. “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana DeSa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kab. Sumedang”. Jurnal Inspirasi. Vol. 12. No. 1. 2021

Sunarti, Neti. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan”. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol. 2 No. 2. 2016.



LAMPIRAN

1. Daftar Nama-nama Pegawai Kantor Camat Tanjung Morawa

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Marianto Irawadi S.Sos	S1	Camat
2	H. Ibnu Hajar S. Sos	S1	Sekcam
3	Pendy Pulungan S.Sos	S1	Kasubbag Pelayanan Umum
4	Nimbun Barus S.Sos	S1	Staf Pelayanan Umum
5	Syafitriani	SMA	Staf Pelayanan Umum
6	Hendri Satrianto A.MD KOM	D1	Staf Pelayanan Umum
7	Adriana Lusia Pandiangan	SMA	Staf Pemerintahan
8	Natalia Hutapea SE	S1	Kasubag Program Dan Keuangan
9	Asin Elisabet Br Barus S.Sos	S1	Staf Keuangan
10	Santi SE	S1	Staf Keuangan
11	Soangkupon Harahap S.Sos	S1	Kasi Pemerintahan
12	Oespida Hasugian	SMA	Staf Pemerintahan
13	Nurhedi S.Sos	S1	Staf Pemerintahan
14	Supriadi SE	S1	Kasi Trantib
15	Zuliya Kaidah S.Sos	S1	Staf Trantib
16	Wan Agus Salim	SMK	Staf Trantib
17	Rizali Santoso	SMA	Staf Trantib
18	Nurhidayah SE	S1	Kasi Pmd
29	Elita Juwita Sari SE	S1	Staf Pmd
20	Nurkelana S.Sos	S1	Staf Pmd
21	Kastar	SMK	Staf Pmd
22	Juliadi, S. Sos	S1	Kasi Kebersihan
23	Maringan Manullang	STM	Staf Kebersihan
24	Legiman	SMK	Staf Kebersihan
25	Dra Jamilah Ginting M.Si	S2	Kasi Kessos
26	Dewi Kurniawati SE	S1	Staf Pelayanan Umum
27	Muhamad Isbat	SMA	Staf Kessos

DAFTAR PERTANYAAN

a. KOMUNIKASI

1. Bagaimana Tranmisi atau penyaluran komunikasi Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Kejelasan komunikasi Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana Konsistensi komunikasi Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

b. DISPOSISI

1. Bagaimana Pengangkatan Birokrasi atau kenaikan jabatan dalam Disposisi Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Insentif (menambah biaya) dalam Disposisi Pelaksana Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

c. SUMBER DAYA

1. Bagaimana Staff atau pegawai pada Sumber Daya pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana informasi pada Sumber daya Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana wewenang pada sumber daya Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana Fasilitas sumber daya yang disediakan oleh pelaksana Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

d. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimana Standar Operating Procedures (SOP) pada Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Fragmentasi atau Tanggung Jawab pada Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Program Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dimasa

Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

a. Komunikasi

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam komunikasi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

b. Disposisi

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam menjalankan Disposisi pada Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

c. Sumber Daya

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Sumber Daya Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

d. Struktur Birokrasi

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang?

1. Informan Kunci

Wawancara Bersama Bapak Camat Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
yaitu Bapak Marianto Irawadi S. Sos



2. Informan Tambahan

Wawancara Bersama Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat) yaitu

Ibu Nurhidaya S.E



3. Informana Tambahan (Masyarakat)

a. Wawancara Bersama Ibu Rubina



b. Wawancara Bersama Ibu Nursiyem



c. Wawancara Bersama Bapak Persadan Ginting



d. Wawancara Bersama Bapak Sadiyo



e. Wawancara Bersama Ibu Sugiani



Lampiran Surat Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN TANJUNG MORAWA**
Jl. Irian No. 237 Pekan Tanjung Morawa Kode Pos 20362
Telepon (061) Faks (061)
Email : tanjungmorawa100@yahoo.com Website :

Tanjung Morawa, 17 Juli 2022

Nomor : 070 / 456
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian/Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area Sumatera Utara
di-
Tempat,

Dengan hormat, sesuai dengan surat Kepala Bappedalitbang Kab. Deli Serdang Nomor 070/1838/BAPPEDALITBANG/ 2022 tanggal 8 Juni 2022 Perihal Izin Riset, dan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 668/FIS.2/01.10/VI/2022 tanggal 8 -6- 2022 perihal Izin Rekomendasi Riset Serta Surat Camat Tanjung Morawa Nomor 070/353 Tanggal 16 Juni 2022 Hal Izin Penelitian/Riset.

Selanjutnya dapat kami sampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area adalah sebagai berikut :

Nama : ADEK SAPITRI
Alamat : Jl. Limau Mungkur Desa Bangun Rejo Dusun VI Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
NIK : 1207026105000003
Jurusan : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kegiatan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
Peserta Penelitian : Sendiri

Telah Selesai melaksanakan Penelitian/Riset di Kantor Camat Tanjung Morawa selama 1 (Satu) bulan dari tanggal 16 Juni 2022 s/d tanggal 16 Juli 2022.

Demikian kami sampaikan, semoga Universitas Medan Area berhasil mengantarkan generasi muda Sumut untuk meraih sukses dimasa yang akan datang, dan terimakasih atas keja samanya.


CAMAT TANJUNG MORAWA
MARIANTO IRWANDI, S.Sos
PEMBINA Tk. I
NIP. 196408241986021004

Cc: File

Scanned by TapScanner

Lampiran Surat Pengambilan Data/Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366678, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Serlabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 668/FIS.2/01.10/VI/2022 08 Juni 2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
Ka. Dinas BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Adek Sapitri
N P M : 188520043
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Camat Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dengan judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-


Scanned by TapScanner

DATA INFORMAN PENELITIAN

Informan Kunci

1. Nama : MARIANTO IRAWADI, S.Sos
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIP : 19640824 198602 1 004
Pangkat/Gol : IV/b
Jabatan : CAMAT
2. Nama : H. IBNU HAJAR, S.Sos.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIP : 19680703 200003 1 010
Pangkat/Gol : III/c
Jabatan : SEKCAM

Informan Utama

1. Nama : NURHIDAYAH, SE
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19750313 199403 2 002
Pangkat/Gol : III/d
Jabatan : KASI PMD
2. Nama : ELITA JUWITA SARI, SE
Jenis Kelamin : Perempuan
NIP : 19801230 201001 2 018
Pangkat/Gol : III/c
Jabatan : STAF PMD



Informan Tambahan

1. Nama : Rubina
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 76 Tahun
2. Nama : Nursiyem
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 72 Tahun
3. Nama : Persadan Ginting
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 45 Tahun
4. Nama : Sadiyo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 71 Tahun
5. Nama : Sugiani
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 54 Tahun